

**PENGARUH PAD, DAU, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMISKINAN (STUDI KASUS 38 KAB/KOTA DI PROV
JAWA TIMUR PERIODE 2010 – 2019)**



JURNAL ILMIAH

OLEH :

ALYA PRASTIKA RANY (175020100111037)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN ILMU EKONOMI

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

MALANG

2021

**PENGARUH PAD, DAU, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMISKINAN (STUDI KASUS 38 KAB/KOTA DI PROV JAWA TIMUR
PERIODE 2010 – 2019)**

Alya Prastika Rany

Fakultas Ekonomi Bisnis

Email : alyaprastika_@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana PAD, DAU, dan Belanja Modal mempengaruhi Kemiskinan pada Studi kasus 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2010 – 2019. Penelitian ini menggunakan data panel dan dalam analisisnya menggunakan analisis jalur. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan software STATA. Hasil pada penelitian ini menyebutkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh langsung positif terhadap Belanja Modal, dan DAU berpengaruh langsung negatif terhadap Kemiskinan, namun PAD dan DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal. Penemuan lain pada penelitian ini yaitu DAU menjadi variabel yang dominan yang kemudian dalam penjelasannya dihubungkan dengan kemandirian suatu daerah.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi, Belanja Modal, dan Kemandirian daerah.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan serta menjadi fokus pemerintah dalam setiap agenda tahunannya karena penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi (Setiawan & Prajanti, 2016). Pembangunan ekonomi yang diharapkan di hampir semua negara yaitu pembangunan yang merata dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat di negara tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan adil pemerintah Indonesia

mengaktualisasikannya dengan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan aktif sejak tanggal 1 Januari 2001 (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Lahirnya otonomi daerah tentu diikuti juga dengan munculnya desentralisasi fiskal yang mana pemerintah daerah menerima wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk mengatur permasalahan fiskalnya. Bagi negara berkembang desentralisasi fiskal diyakini sebagai solusi untuk permasalahan ekonomi (Bartlet et al., 2020). Dalam pelaksanaannya pelimpahan wewenang tersebut diikuti oleh penyerahan sumber – sumber pendanaan yang sesuai dengan *money follow function*. Namun masih adanya mekanisme transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke daerah didasarkan atas pertimbangan mengenai ketimpangan secara horizontal maupun vertikal (Haryanto, 2015).

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi fiskalnya yang mana akan masuk pada kantong PAD. Pemerintah pusat tetap memberikan dana transfer rutin, salah satunya DAU. Dalam (Khusaini, 2020) menjelaskan bahwa Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, keputusan mengenai alokasi barang publik dianggap lebih efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya mengingat setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Berdasarkan fungsinya belanja modal dapat mampu mewujudkan harapan dilaksanakannya desentralisasi fiskal yaitu peningkatan kualitas layanan publik yang mana pada akhirnya akan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Namun faktanya setelah 20 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih banyak ditemukan fakta lapangan yang kontras, salah satunya masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi yang terdiri dari 38 kabupaten/kota ini memiliki permasalahan kemiskinan. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa yaitu 33.3%. BPS (Badan Pusat Statistika) mencatat pada bulan Maret tahun 2020, Jawa Timur berada di peringkat ke 14 kategori jumlah penduduk miskin dengan 2.736,97 ribu jiwa penduduk miskin di daerah pedesaan dan peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Tengah dengan 1.682,14 ribu jiwa penduduk miskin di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistika, 2020). Berdasarkan presentase penduduk miskin, provinsi Jawa Timur berada di peringkat ke 13 dengan 7,89% penduduk miskin di daerah perkotaan dan peringkat ke 15 dengan 14,77% penduduk miskin di daerah pedesaan.

Selain latar belakang kekontrasan fakta yang ada, penulis begitu tertarik untuk melakukan penelitian ini karena seperti yang kita ketahui masih terbatasnya penelitian terkait desentralisasi fiskal dengan berbagai konsep di dalamnya. Masih sangat terbatas jumlah jurnal – jurnal tentang desentralisasi dengan akreditasi baik (sinta 1 atau 2) karena banyak

peneliti lain lebih tertarik meneliti masalah ekonomi lainnya. Hal yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu pada pemutakhiran data serta pada penekanan konsep – konsep pro poor budgeting dan desentralisasi fiskal. Uraian diatas sehingga menghasilkan sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal terhadap Kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 -2019 ? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal terhadap Kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 -2019

B. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

Robert Chambers mendefinisikan kemiskinan sebagai gabungan dari berbagai keadaan kurang menguntungkan yang saling berhubungan sehingga menyebabkan seseorang terjebak didalamnya dan biasanya sangat sulit keluar dari keadaan tersebut (Bappenas, 2018). Kemiskinan dikonsepsikan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif menurut (Bappenas, 2018). Secara absolut, kemiskinan digambarkan sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif merupakan gambaran kondisi dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakmerataan pembangunan.

Todaro (1995) dalam (Setiyawati & Hamzah, 2007a) menyebutkan mengenai indikator penyebab seseorang dapat terjebak dalam kemiskinan, yaitu berhubungan dengan bidang sosial dan ekonomi diantaranya rendahnya pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berbeda dengan Todaro, Nurkse (1961) dengan teorinya Vicious Circle Of Poverty menjelaskan mengenai fenomena lingkaran setan, siklus penyebab banyaknya masyarakat miskin yang terjatuh ke kemiskinan khususnya di negara miskin.

B. Belanja Modal

Dalam bukunya (Khusaini M. , Keuangan Daerah, 2018) menjelaskan bahwa belanja modal adalah salah satu pengeluaran pemerintah yang biasanya diperuntukkan dalam pengadaan dan pembangunan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan) seperti ; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sebuah teori yang membahas pengeluaran pemerintah pernah di ungkapkan

oleh Rostow dan Musgrave. Mereka mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Tahap pembangunan ekonomi tersebut terbagi menjadi tiga yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjutan. Semakin tinggi tahapannya maka semakin sedikit peranan pemerintahannya karena pemerintah dianggap lebih fokus dalam menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan aktivitas sosial.

Berbeda dengan Rostow dan Musgrave, Peacock dan Wiseman mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memperbesar pengeluarannya serta diikuti dengan memperbesar penerimaan pajaknya. Namun menurut Peacock dan Wiseman dalam memperbesar pajak tersebut masyarakat memiliki batas toleransi atas nilai kenaikannya (Pane et al., 2018). Konsep belanja dan investasi juga pernah disinggung oleh Keynes, menurutnya dengan melibatkan pihak pemerintah dapat membantu suatu negara keluar dari kondisi resesinya dimana permintaan dan penawaran dibawah nilai optimalnya. Melalui kebijakan belanja dan investasi pemerintah dianggap mampu mengembalikan posisi penawaran dan permintaan dalam pasar (Artikel DJKN, 2018). Kemudian dalam Todaro (2006) mengungkapkan bahwa dalam teori Harrod – Domar, untuk menumbuhkan perekonomian di suatu wilayah diperlukan pembentukan modal dalam rangka menambah stok modal yang ada.

C. Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Khakim et al., 2011), semua penerimaan daerah yang bersifat meningkatkan aktiva atau menurunkan utang pada periode tahun yang bersangkutan dapat disebut pendapatan asli daerah. Lebih sederhananya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang bersumber dari potensi yang dimiliki wilayah itu sendiri dan dalam proses pemungutannya berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjelaskan lebih rinci, menurut Pasal 30 PP No 12 Tahun 2019 PAD terdiri dari berbagai pendapatan yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain – lain PAD yang sah (Peraturan Pemerintah, 2019).

Pemikiran ekonomi mengenai konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah pernah disinggung oleh Keynes. Menurut Keynes dalam mengendalikan dampak sosial dan lingkungan akibat adanya campur tangan pemerintah, pemerintah harus melindungi masyarakat dari produk – produk yang membahayakan atau tidak menguntungkan bagi kehidupan dan lingkungan masyarakat melalui kebijakan pajak. Pemerintah selalu membutuhkan sumber – sumber penerimaan karena pemerintah harus mengambil bagian dalam menyediakan barang publik yang tidak disediakan oleh pihak swasta atau privat.

Kebijakan mengenai pengeluaran dan permintaan inilah yang dikenal dengan istilah kebijakan fiskal (Artikel DJKN, 2018).

D. Dana Alokasi Umum

Menurut (Ginting, 2018), Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan komponen penting dalam dana perimbangan karena memiliki peran penting atas pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka desentralisasi. Dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dengan perhitungan khusus dikategorikan sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) (Setiyawati & Hamzah, 2007a). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut (Putryuda et al., 2017) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berfungsi sebagai pemerata khususnya pemerataan horizontal (horizontal equalization) dengan cara menutup celah fiskal (fiscal gap) yang ada. Pemerintah pusat memberikan DAU dalam rangka menutupi kekurangan fiskal atas jumlah PAD yang berbeda – beda antar daerah. Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang artinya pemerintah daerah menerima sepenuhnya otoritas dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tiap daerah, dalam hal ini diutamakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Mendukung pendapat sebelumnya, menurut Shama Gamkhar menjelaskan bahwa Transfer fiskal antar pemerintah sering digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk mengatasi kesenjangan fiskal vertikal, menangani ketidakadilan fiskal horizontal, memberikan kompensasi manfaat, dan mempengaruhi kebijakan subnasional dalam perpajakan, pengeluaran, dan stabilisasi ekonomi regional dan lokal. Searah dengan Robin Boadway, Anwar Shah dan Shama Gamkhar dalam buku yang sama, menurut Leonard S Wilson sistem pemerataan dirancang agar pemerintah memberikan perlakuan agregat yang sama di seluruh yurisdiksi subnasional (negara bagian) atau dalam konteks ini daerah otonom. Menurutnya hal tersebut biasanya dilakukan dengan menyamakan potensi pendapatan pemerintah dengan cara melakukan transfer pendapatan (Chakraborty, 2016).

E. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak terhadap perekonomian suatu daerah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya wewenang penuh yang diterima oleh daerah otonom untuk memajukan wilayah otonomnya melalui berbagai kebijakan termasuk dalam perencanaan keuangannya (Kota & Jawa, 2015). Kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal tersebut juga diikuti dengan

pelimpahan semua kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah kecuali urusan pemerintah pusat yang absolut seperti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Dalam penyerahan kewenangan pada pemerintah daerah harus diikuti sertakan penyerahan pendanaan seperti pajak, dana transfer dari pemerintah pusat (Purnamasari, 2015).

Dalam rangka menciptakan aspek kemandirian daerah tersebut, pemerintah daerah harus menggali kemampuan fiskalnya sendiri. Pemerintah daerah dapat menggali kemampuan fiskalnya melalui pajak, retribusi, pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang mereka punya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah berarti daerah tersebut semakin tidak bergantung dengan pemerintah pusat yang mana juga berarti aktivitas perekonomian di daerah tersebut tinggi. Selain menggali potensi fiskalnya sendiri, pemerintah daerah juga masih mendapatkan tambahan dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, mengingat ketidak merataan potensi fiskal antar daerah (horizontal imbalance).

Selanjutnya diketahui bahwa terdapat salah satu jenis belanja yang sangat penting karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap berbagai aspek, jenis belanja tersebut adalah Belanja Modal. Belanja yang digunakan untuk semua kegiatan investasi suatu pemerintah daerah disebut dengan belanja modal. Belanja modal biasanya berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pemerintah daerah dan biasanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonominya (Rizky et al., 2016).

Semakin besar penerimaan suatu daerah khususnya dari kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) maka tentu daerah tersebut juga memiliki kemampuan belanja yang lebih besar. Ketika peluang belanja suatu daerah mengalami peningkatan tentu peluang dana tersebut digunakan untuk belanja modal juga akan semakin besar, hal ini dikarenakan bahwa belanja modal merupakan belanja langsung yang memiliki peran penting dan terikat erat dengan program dan kegiatan pemerintah daerah.

H_{A1} : PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 38 kabupaten/kota di Prov Jawa Timur tahun 2010 – 2019.

F. Hubungan Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu pemerintah daerah yang paling mengerti wilayah otonomnya, sehingga dengan diserahkannya kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah

diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola wilayah otonomnya dengan baik. Pengelolaan wilayah otonom dengan baik dapat ditunjukkan melalui belanja modal yang baik dan efisien yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Purnamasari, 2015). Belanja modal memiliki banyak manfaat diantaranya dalam proses penciptaan dan memperoleh tanah, bangunan, jalan, dan irigasi seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan No 102/PMK.02/Tahun 2018.

Penjabaran mengenai belanja modal tersebut dapat kita tarik garis besarnya yaitu belanja modal ini dapat langsung mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat yang dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan. Adam Smith mengemukakan 3 fungsi dari pemerintah yang meliputi keamanan, keadilan, dan menyediakan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti jalan, irigasi, dll (Khusaini M. , Ekonomi Publik, 2019). Selain itu Belanja modal juga menjadi sangat penting mengingat bidang urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah dikelompokkan pada urusan wajib dan pilihan. Beberapa urusan wajib pemerintah daerah membutuhkan belanja modal sebagai alat agar urusan wajib tersebut terrealisasikan, maka dapat dikatakan bahwa belanja modal menjadi sangat penting.

H_{A2} : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemiskinan pada 38 kabupaten/kota di Prov Jawa Timur tahun 2010 – 2019.

G. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal

Menurut Mardiasmo dalam (Khakim et al., 2011), keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dua hal yang mendasar dan sangat penting bagi sebuah pemerintah daerah untuk menjalankan semua program dan kegiatannya. Pemerintah diharuskan untuk berhati – hati dalam mengelolanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa RKA – SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun berdasarkan 3 pendekatan penting diantaranya ; KPJM, Penganggaran Terpadu, dan ABK. ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) atau Performance Based Budgeting merupakan pendekatan yang mengharuskan melibatkan penilaian atas sebuah kinerja dalam menyusun sebuah anggaran. Pendekatan ini terdiri dari program dan kegiatan yang juga disertai dengan target indikator kinerja suatu satuan anggaran. Efisiensi,

efektivitas, transparansi, fokus, kemudahan, menyempurnakan koordiansi, dan menghilangkan duplikasi kegiatan menjadi tujuan dari dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja (ABK).

Dalam pelaksanaan ABK tersebut terdapat beberapa prinsip mendasar diantaranya ; (1) Prinsip Money Follow Function, prinsip ini menjelaskan pembagian kewenangan dalam pendanaan suatu urusan yaitu untuk urusan pemerintah daerah tentunya didanai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan untuk urusan pemerintah pusat didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). (2) Prinsip Value For Money, prinsip Value For Money merupakan prinsip yang memperhatikan input, harga input, output, dan outcome pada setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. (3) Prinsip Good Governence, Prinsip ini mengarah pada suatu kondisi yang harus bisa terpenuhi dalam proses pengelolaan keuangan sektor publik. (4) Prinsip Output – Outcome Oriented, dan (5) Prinsip Fleksibilitas Akuntabilitas.

Selain ABK, salah satu konsep yang juga harus dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah konsep Pro Poor Budgeting. Konsep tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Penganggaran yang Pro Poor Budgeting merupakan anggaran yang pro terhadap masyarakat miskin, dalam artian lebih sederhananya dalam setiap program atau kegiatan yang direncanakan pasti memberikan dampak terhadap masyarakat miskin. Terdapat beberapa karakteristik dari anggaran yang mematuhi konsep Pro Poor Budgeting, diantaranya; (1) mengalokasikan anggran untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin, (2) mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik untuk masyarakat miskin, (3) mengalokasikan anggaran untuk ruang partisipasi dan aktualisasi masyarakat miskin, (4) mengalokasikan anggaran untuk perencanaan dan penilaian terhadap program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat miskin, dan (5) Tidak membebani masyarakt miskin untuk pembayaran berbagai pungutan pajak dan retribusi.

Jika penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan seoptimal mungkin, sesuai dengan beberapa prinsip dan konsep yang diatur, khususnya belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian suatu daerah tentu akan memberikan dampak terhadap angka kemiskinan.

H_{A3} : PAD dan DAU berpengaruh terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal pada 38 kabupaten/kota di Prov Jawa Timur tahun 2010– 2019.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dan data series tahun 2010 – 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari beberapa website instansi diantaranya ; (1) dokumen laporan realisasi APBD yang bersumber dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPk) melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id, dan (2) data kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari situs BPS (Badan Pusat Statistik) melalui website <https://jatim.bps.go.id/>. Penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial yang menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan perangkat lunak STATA.

Berikut diagram jalur serta model persamaan estimasinya :

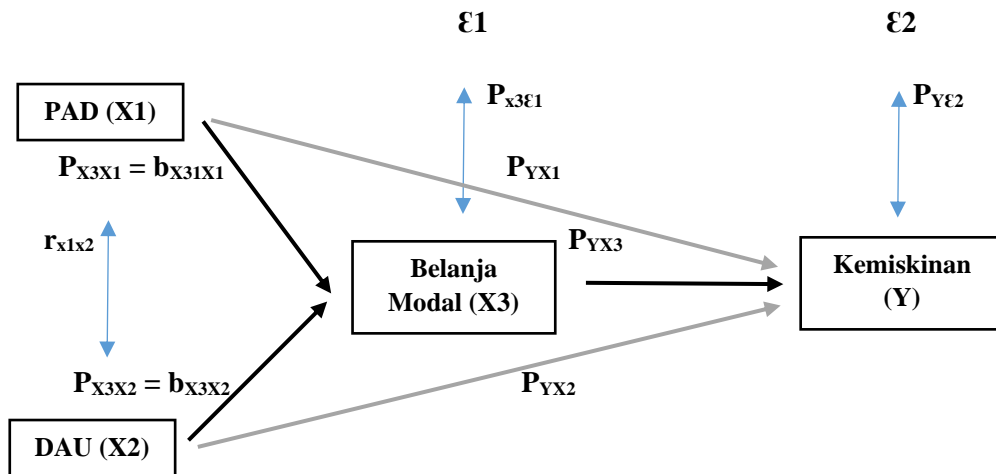


Diagram 1

- Struktur I (Belanja Modal - PAD DAU)

$$X3 = \alpha + PX3X1X1 + PX3X2X2 + PX3\epsilon_1 \quad (1)$$

$$X3 = \alpha + \beta X1 + \beta X2 + \epsilon_1$$

- Struktur II (Kemiskinan - PAD DAU Belanja Modal)

$$Y = \alpha + PYX1 X1 + PYX2 X2 + PYX3X3 + PY\epsilon_2 \quad (2)$$

$$Y = \alpha + \mu X1 + \mu X2 + \mu X3 + \epsilon_2$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik dan Hipotesis

Diagram 1 merupakan diagram jalur pada penelitian ini. Setelah membuat model jalur dengan diagram jalur pada sub bab sebelumnya, langkah selanjutnya dapat dilakukan pembuatan matrik koefisien korelasi sederhana seperti pada tabel 1 berikut. Korelasi ini berguna untuk mengetahui kekuatan dan arah dari antara dua variabel. Selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi ganda (R^2), pada tahap ini kita menggunakan regresi panel. Menggunakan regresi panel tersebut kita juga dapat melihat bagaimana kedua struktur model yang dibuat yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya memenuhi asumsi analisis jalur. Asumsi pada Path Analisis atau analisis jalur juga mengikuti asumsi pada regresi linear, maka asumsi yang harus dipenuhi juga tidak jauh berbeda yaitu: (1) Pengujian Normalitas Data, (2) Pengujian heteroskedastisitas, (3) Pengujian Multikolinearitas, dan (4) Pengujian kelinearitasan (Dr. Hironymus Ghodang, 2020). Selain itu, penggunaan regresi panel ini juga berguna untuk tahap analisis jalur berikutnya yaitu menguji signifikansi koefisien jalur dengan cara melihat nilai T statistiknya.

Tabel 1

	PAD	DAU	Belanja Modal	Kemiskinan
PAD	1			
DAU	0.1854	1		
Belanja Modal	0.4561	0.5790	1	
Kemiskinan	-0.0704	-0.0406	-0.1265	1

Penelitian ini menggunakan data panel sehingga untuk melakukan uji signifikansi variabel dalam rangka memenuhi asumsi pada analisis jalur diperlukan untuk meregresi data. Tidak jauh berbeda saat meregresi data panel pada umumnya, tentu harus dilakukan uji model. Pada saat uji model pada struktur model pertama menghasilkan bahwa REM, kemudian pada struktur keduanya yaitu FEM. Usai memperoleh model terbaiknya, selanjutnya dapat dilakukan uji asumsi klasik khususnya untuk struktur II. Struktur model pertama tidak diperlukan untuk menguji asumsi klasik, hal ini dikarenakan menggunakan model REM yang mana bukan lagi OLS melainkan GLS. Namun dikarenakan pada penelitian ini menggunakan analisis jalur yang mengharuskan untuk tidak adanya permasalahan multikolinearitas maka pada struktur model pertama diharuskan untuk diuji. Kedua struktur tersebut dinyatakan lolos asumsi klasik terkecuali normalitas serta heteroskedastisitas pada struktur II. Metode Robust digunakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut pada struktur model kedua. Tabel 2 dan 3 menunjukkan hasil regresi data panel akhir, setelah

melakukan uji multikolinearitas untuk struktur model pertama dan setelah melakukan metode perbaikan robust pada struktur model kedua.

Tabel 2

Struktur I (Belanja Modal - PAD DUA)

Variable	Coefficient	Beta	Uji T		Uji F		R ²
			P> z	Z	Prob	Waldchi(2)	
PAD	0.0387666	0.3611682	0.000	5.23	0.000	312.11	0.4130
DAU	0.595741	0.5119856	0.000	15.74			

Tabel 3

Struktur II (Kemiskinan – PAD DUA Belanja Modal)

Model	Uji T		Uji F		R ²	Coefficie nt	Beta	Constant a	Srandard Error
	P> t	T	Prob	F					
<i>Fixed Effect</i>									
PAD	0.06 7	- 1.89	0.002 6	5.7 0	0.044 9	-9.09 × 10 ⁻⁰⁶	- 0.011363 3	21.42209	4.81 × 10 ⁻⁰⁶
DAU	0.01 4	- 2.58				- 0.000957 8	0.047657 5		0.000371
Belanj a Modal	0.52 2	- 0.65				- 0.000177 5	- 0.148867 1		0.0002745

Pada hasil regresi yang disajikan pada tabel 2 dan 3 dapat dilihat terdapat kolom beta koefisien. Nilai beta koefisien merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai jalur pada analisis jalur. Dari hasil regresi tersebut, kemudian dapat di tuliskan nilai koefisien betanya pada setiap jalurnya seperti yang tergambar pada diagram 2. Namun diketahui bahwa dari hasil regresi tersebut terdapat dua jalur yang tidak signifikan yaitu pada struktur II PAD terhadap Kemiskinan dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan. Pada struktur II hanya variabel DAU saja yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut

membuat penelitian ini sulit untuk dilanjutkan pada proses akhir (analisis pengaruh langsung dan tidak langsung) karena sedikitnya variabel yang signifikan.

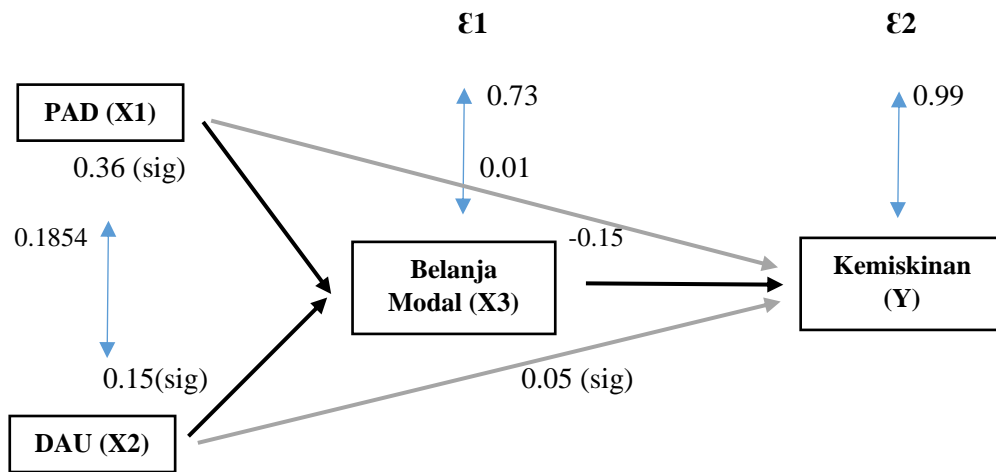


Diagram 2

Struktur model kedua merupakan struktur model yang memiliki beberapa variabel bebas yang tidak signifikan oleh sebab itu pada struktur model kedua ini dilakukan metode trimming. Tabel 4 menunjukkan regresi setelah metode trimming, dimana hanya tersisa variabel DAU saja yang berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Hal yang sama dilakukan yaitu memasukkan beta koefisien pada tiap jalur. Usai memasukkan nilai koefisien jalur langkah selanjutnya yaitu harus melakukan uji kecocokan model (model fit). Dalam melakukan uji kecocokan model diperlukan untuk membandingkan matrik korelasi teoritis dengan matrik korelasi empirisnya. Kemudian setelah melakukan perbandingan dapat dilakuakn perhitungan kai kuadrat yang dapat menjadi parameter dalam menentukan model tersebut layak atau tidak. Pada diagram 3 merupakan diagram akhir setelah metode trimming dan uji kecocokan model.

Tabel 4

Variable	Coefficient	Beta	Uji T		Uji F		R ²
			P> t	T	Prob	F	
DAU	-10834 × 10 ⁻⁰⁷	-0.0406367	0.012	-2.64	0.0122	6.94	0.0441

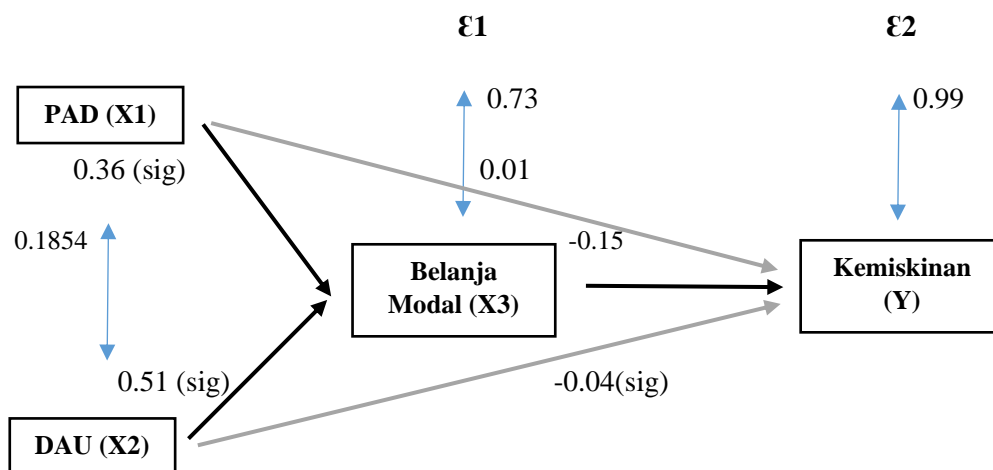


Diagram 3

Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa panah PAD dan DAU yang mengarah pada Belanja Modal merupakan jalur yang signifikan, dimana variabel DAU memiliki koefisien jalur sebesar 0.51 dan variabel PAD memiliki koefisien jalur sebesar 0.36. Nilai koefisien jalur tersebut memiliki makna kekuatan dan arah pengaruh dari sebuah variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Variabel DAU yang merupakan variabel eksogen memiliki pengaruh positif terhadap variabel endogennya yaitu belanja modal sebesar 51% sedangkan variabel PAD yang juga merupakan variabel eksogen terhadap variabel endogen belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif sebesar 36%. Penjelasan sebelumnya dapat menguatkan bahwa hipotesis nul pada penelitian ini ditolak sehingga **H_{A1} diterima yang artinya PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010 – 2019).**

Hal yang berbeda dapat dilihat pada jalur yang memiliki banyak variabel yang tidak signifikan pada diagram 3, dimana merupakan struktur model kedua yang menjadikan variabel kemiskinan sebagai variabel endogen. Pada struktur tersebut diketahui hanya variabel DAU yang berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Variabel DAU sebagai variabel eksogen memiliki koefisien jalur sebesar -0.04 yang artinya DAU berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan sebesar 4%. Jalur PAD terhadap Kemiskinan serta jalur Belanja Modal terhadap Kemiskinan merupakan dua jalur yang tidak signifikan. Jalur PAD terhadap Kemiskinan memiliki nilai koefisien sebesar -0.01 yang artinya PAD berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan sebesar 1%. Kemudian jalur Belanja Modal terhadap Kemiskinan memiliki nilai koefisien -0.15 yang artinya Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan sebesar 15%.

Pada bagan tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh tidak langsung melalui sebuah variabel intervening yaitu variabel PAD dan DAU terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal. Perhitungan pengaruhnya yaitu dengan cara mengkalikan nilai koefisien jalurnya. Pengaruh tidak langsung variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal yaitu sebesar -0.064 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jalur langsung = -0.01
- Jalur tidak langsung = $0.36 \times (-0.15) = -0.054$
- Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal yaitu dengan menambah nilai jalur langsung dan nilai jalur tidak langsung = $-0.01 + (-0.054) = -0.064$

Dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebesar 6.4%. Kemudian pengaruh tidak langsung variabel DAU terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal yaitu sebesar -0.1165 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jalur langsung = -0.04
- Jalur tidak langsung = $0.51 \times (-0.15) = -0.0765$
- Sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh DAU terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal yaitu dengan menambahkan nilai jalur langsung dan nilai jalur tidak langsung = $-0.04 + (-0.0765) = -0.1165$ Hasil perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebesar 11.65%.

Namun nilai koefisien pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening tersebut dinyatakan tidak valid mengingat terdapat jalur yang tidak signifikan (tidak lulus uji T). Dari penjelasan tersebut dapat memperkuat bahwa **H_{A2} dan H_{A3} pada penelitian ini ditolak.**

B. Analisis Ekonomi

PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan bagi setiap daerah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan penyerahan otonomi daerah terhadap daerah otonom, setiap daerah memiliki hak dalam proses menggali potensi fiskalnya. Setiap daerah diberikan keleluasaan dalam meningkatkan pendapatannya melalui potensi fiskal yang dimiliki daerahnya. Pemanfaatan potensi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menambah kantong PAD daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk terus menggali potensi fiskal yang dimiliki wilayah otonomnya agar terus dapat meningkatkan

PAD daerah. Kenyataannya potensi fiskal yang dimiliki setiap daerah berbeda – beda, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat melakukan transfer fiskal untuk setiap daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah melalui DAU.

Pada kantong pendapatan setiap daerah, PAD dan DAU merupakan pendapatan inti yang teramat penting bagi pemerintah daerah. Tak hanya penting, PAD dan DAU juga merupakan 2 kantong pendapatan yang memiliki porsi besar pada pendapatan suatu daerah. Dalam penggunaan PAD dan DAU, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam perencanaan dan penggunaannya selama berpegang teguh pada tujuan desentralisasi itu sendiri, lebih khususnya mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang pada masa sentralistis mungkin belum tercukupi atau belum merata. PAD dan DAU berperan penting dalam mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut melalui belanja daerah.

Belanja Daerah merupakan kantong pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya (berbagai aspek). Salah satu belanja yang memiliki peran penting dalam sebuah pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan dari desentralisasi adalah Belanja Modal. Hal ini mengingat belanja modal merupakan belanja yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program rencana yang dibuat oleh suatu pemerintah daerah. Penggunaan PAD dan DAU tentu banyak digunakan untuk belanja daerah lainnya yang besar kemungkinannya untuk belanja modal, mengingat PAD dan DAU merupakan pendapatan daerah dengan porsi besar. Penjelasan ini searah dengan hasil penelitian ini pada hipotesis pertama.

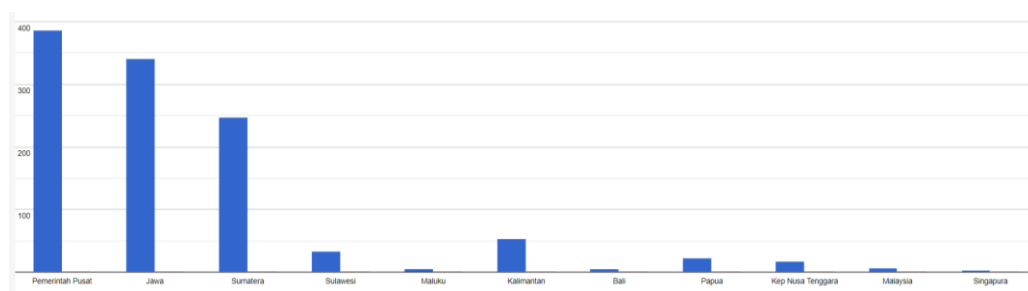
Menghubungkan PAD, DAU, dan Belanja Modal, pada penelitian ini diketahui bahwa hanya variabel DAU saja yang berpengaruh signifikan. Terdapat beberapa penjelasan yang dapat mendukung dari penemuan pada penelitian ini. Salah satu alasannya yaitu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan terdapat banyak cara selain menggunakan belanja modal yaitu dengan belanja sosial dan subsidi, dll. Tak hanya itu menurut (Priatno, 2013) ketidakefisienan dalam pengeluaran pemerintah lebih khususnya belanja modal dikarenakan memang komposisi pada Anggaran Pendapatan Belanja masih belum cukup memadai untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan merata yang pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan melalui peningkatan kegiatan ekonomi seperti tujuan desentralisasi. Komposisi alokasi belanja pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja masih didominasi oleh belanja pegawai.

Ketidakefisienan ini juga dapat disebabkan oleh pemerintah daerah yang belum memanfaatkan belanja daerahnya (khususnya belanja modal) untuk program atau kegiatan

yang bermisi dalam pengentasan kemiskinan (dalam kasus belanja modal proyek – proyek) atau dapat dikatakan belum meemenuhi konsep pro poor budgeting. Tidak hanya karena komposisi dan pemenuhan konsep pro poor budgeting, membahas mengenai keefisienan dalam pengeluaran pemerintah (dalam penelitian ini belanja modal) tentu memiliki hubungan erat dengan sebuah birokrasi. Konsistensi suatu birokrasi dalam merencanakan sebuah program juga menjadi sangat penting. Selama 10 tahun (periode 2010 – 2019) tentu sudah melewati beberapa kali pergantian birokrasi, hal ini tentu berdampak pada perubahan rencana program/kegiatan suatu pemerintah daerah yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pengalokasian anggaran.

Selain mengenai komposisi, pemenuhan konsep pro poor budgeting, dan konsistensi suatu birokrasi pada pemerintahan daerah, ketidak efisienan juga dapat terjadi akibat adanya peluang besar untuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada kegiatan yang hanya menguntungkan satu pihak saja (rent seeking) (Priatno, 2013). Dalam sebuah data yang dipublikasikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah menyebutkan bahwa pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah tindak pidana korupsi tertinggi setelah pemerintah pusat. Dilaporkan terdapat 341 perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 2020. Sebuah fakta juga menyebutkan bahwa berdasarkan provinsi, Provinsi Jawa Timur merupakan peringkat ketiga dengan kasus korupsi tertinggi berdasarkan catatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sepanjang 2002 - 2019. Provinsi Jawa Timur berada di bawah Provinsi Jawa Barat dengan 85 kasus (Cahyono, 2020).

Grafik 1

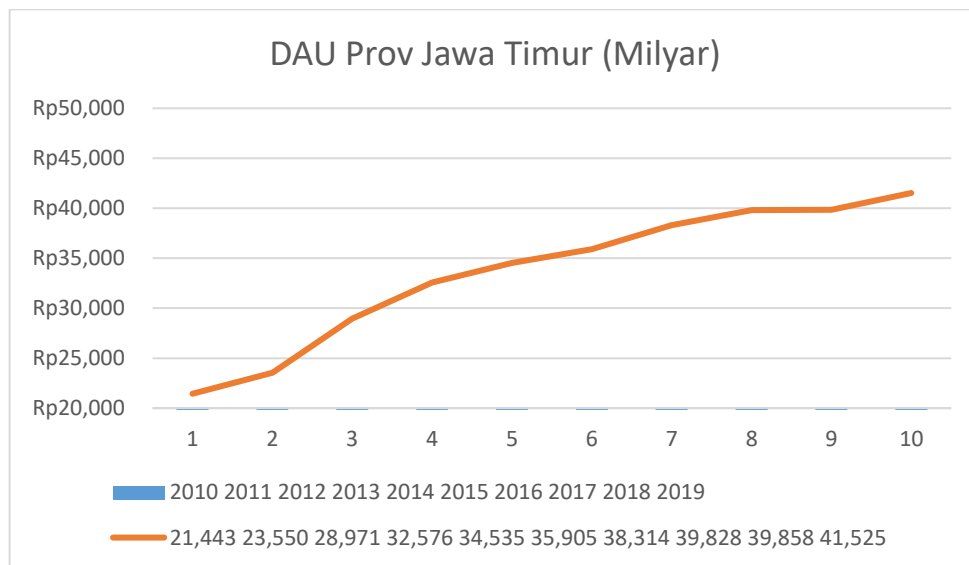


Sumber : kpk.go.id

Memperluas pembahasan atas hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa hasil penelitian ini menyebutkan bahwa PAD dan DAU mempengaruhi Belanja Modal, namun selain hasil tersebut juga ditemukan sebuah fakta bahwa dalam perbandingan presentase pengaruhnya,

DAU memiliki nilai presentase lebih besar terhadap Belanja Modal daripada PAD. Tak hanya itu, pada analisis jalur juga hanya variabel DAU saja yang berpengaruh terhadap Kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa variabel DAU menjadi variabel yang selalu signifikan baik terhadap Belanja Modal maupun Kemiskinan. DAU menjadi variabel yang mendominasi dalam penelitian ini, sehingga dapat dikatakan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ini masih bergantung pada transfer pemerintah pusat yaitu DAU.

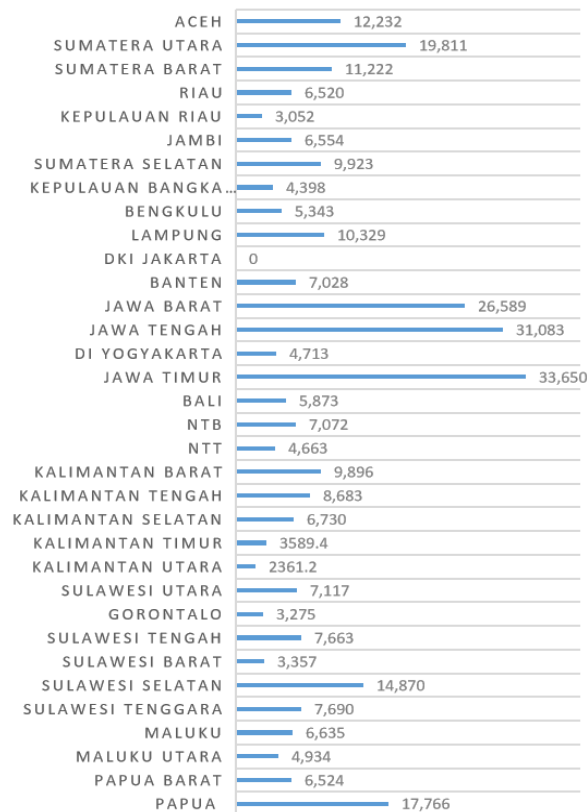
Grafik 2



Sumber Data : DJPK.Kemenkeu.go.id

Sebuah fakta yang dapat menjadi penguat atas pernyataan bahwa studi kasus ini (38 Kab dan Kota di Prov Jawa Timur) masih bergantung pada transfer pusat yaitu dapat dilihat dari grafik 2 dan grafik 3. Pada grafik 2 menjelaskan bahwa DAU di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2010 hingga 2019. Sebuah data yang dapat mendukung pernyataan sebelumnya yaitu pada tahun 2017, Provinsi Jawa Timur menerima DAU tertinggi pada 10 Provinsi penerima DAU tertinggi lainnya yaitu sekitar Rp 40.2 M (databoks, 2016). Lebih rinci dapat dilihat pada grafik 3, dimana menjelaskan bahwa Prov Jawa Timur adalah Provinsi tertinggi penerima DAU jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya selama periode 2010 hingga 2019, dengan rata - rata 33.650 Miliar.

Grafik 3



Sumber Data : DJPK.Kemenkeu.go.id

Masih tingginya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah menandakan bahwa daerah tersebut belum secara efisien memanfaatkan potensi fiskal yang dimiliki yang berdampak pada tingkat kemandiriannya. Tingginya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Pernyataan sebelumnya dapat memperkuat bahwa pemerintah daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur belum memanfaatkan potensi fiskal yang dimiliki sehingga memiliki tingkat kemandirian yang terbilang rendah, mengingat hasil penelitian ini hanya DAU yang berpengaruh signifikan baik terhadap Belanja Modal maupun Kemiskinan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

PAD dan DAU mempengaruhi Belanja Modal pada studi kasus 38 Kabupaten dan Kota di Prov Jawa Timur ini, mengingat PAD dan DAU adalah sumber pendapatan utama yang

dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga jika digabungkan kedua pendapatan tersebut memiliki porsi yang cukup besar. Namun faktanya pada penelitian ini pengeluaran pemerintah daerah masih didominasi oleh DAU dalam melakukan kegiatan Belanja Modal dan mengatasi Kemiskinan. Harapan dilaksanakannya desentralisasi fiskal agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan melalui belanja modal dan akan memberikan dampak pada kegiatan perekonomian sehingga dapat mengurangi kemiskinan di daerah tersebut nyatanya belum terlaksana di 38 Kabupaten dan Kota di Prov Jawa Timur ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan rekomendasi :

- Pemerintah pusat dapat membuat program insentif untuk pemerintah daerah agar lebih berusaha dalam menggali potensi fiskal daerahnya, sehingga dapat memotivasi daerah agar lebih meningkatkan PADnya
- Pemerintah daerah secara rutin melakukan observasi terkait wilayah otonomnya terkait dengan peningkatan pemanfaatan potensi fiskal.
- Pemerintah daerah lebih memperhatikan peningkatan efisiensi alokasi terkait belanja daerah dan efisiensi fiskal terkait dengan sumber pendapatan.
- Pemerintah daerah harus memperketat (berhubungan dengan teknis pengawasan) dalam setiap pengeluarannya (khususnya Belanja Modal) agar lebih pro poor budgeting dan dapat meminimalisir perilaku rent seeking.
- Pemerintah daerah mengupayakan (dapat melalui perda) agar pemerintah daerah memiliki formula sebagai batas minimum dalam pengalokasian belanja daerah yang bersifat mendukung pengentasan kemiskinan (khususnya belanja modal), sekalipun terjadi perubahan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya Prof. Dr Moh Khusaini SE., M.Si., MA, yang memberi masukan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel DJKN*. (2018, April 20). Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>
- Bappenas, K. P. P. N. (2018). *Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas*.
- Bappenas, K. P. P. N. (2018). *Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas*.
- Bartlet, W., Đulić, K., & Kmezić, S. (2020). The impact of fiscal decentralisation on local economic development in Serbia. *Lex Localis*, 18(1), 143–163. [https://doi.org/10.4335/18.1.143-163\(2020\)](https://doi.org/10.4335/18.1.143-163(2020))
- Chakraborty, P. (2016). Intergovernmental Fiscal Transfers in India. In *Economics*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199458950.003.0006>
- databoks*. (2016, Dec 08). Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/08/10-provinsi-penerima-dana-alokasi-umum-terbesar-2017#>
- Ginting, A. M. (2018). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346.
- Khakim, L., Hermawan, I., Solechan, A., & PS, V. T. (2011). Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 281. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.199>
- Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Dalam M. Khusaini, *Keuangan Daerah* (hal. 166). Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik. Dalam M. Khusaini, *Ekonomi Publik* (hal. 105-106). Malang: UB Press.
- Khusaini, M. (2020). *Regional Fiscal Policy Convergence In The Decentralization Era : A Dynamic Spatial Analysis*. 9(02), 5516–5524.
- Kota, K., & Jawa, P. (2015). Vol. 5, No. 2, Oktober 2015 *E S E N S I Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5(2), 173–186.

- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 120–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13372>
- Pane, D. N., Fikri, M. EL, & Ritonga, H. M. (2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Pemerintah. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Purnamasari, D. (2015). Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*, 2006, 1–70. http://eprints.undip.ac.id/45748/1/12_PURNAMASARI.pdf
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009>
- Setiawan, A. B., & Prajanti, S. D. W. (2016). Journal of Indonesian applied economics. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 176–190. <http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/183/165>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN: PENDEKATAN ANALISIS JALUR. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). In *Diterjemahkan oleh Drs Haris Munandar, MA dan Puji AL, SE dari Buku Economic Development Ninth Edition. Jakarta: Erlangga.*